
**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI TERHADAP KETERSEDIAAN PUPUK
2021 DI DESA TEGALMOJO, KECAMATAN TEGALSIWALAN, KABUPATEN
PROBOLINGGO****Oleh****Imam Sucahyo¹, Husni Mubaroq², Mohammad Dwi Febriyanto³****^{1,2,3} S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Universitas Panca Marga Probolinggo****Email: [1imamsucahyo@gmail.com](mailto:imamsucahyo@gmail.com)****Abstract**

The policy for distributing Farmer Cards in Probolinggo Regency continues to be carried out. However, so far it has not been able to achieve the target. There are still many cards that have been printed but have not been distributed. The distribution of farmer cards is carried out in stages. In accordance with the availability of cards that are ready to be distributed to farmers registered in the Electronic Definitive Plan for Group Needs (E-RDCK). One of the beneficiaries of Kartu Tani assistance is Tegalmojo Village, Tegalsiwalan District, Probolinggo Regency, which so far has only distributed 20 copies, which should have been 100. The purpose of this study was to analyze the implementation of the farmer card program on the availability of fertilizer in 2021 in Tegalmojo village, Tegalsiwalan district, Probolinggo district based on the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, communication, disposition, and the economic, social, political and environmental factors. the obstacle.. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The subjects of this study consisted of the village head of Tegalmojo, the head of the farmer group. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the Kartu Tani program on the availability of fertilizer in 2021 in Tegalmojo village is quite good but cannot be redeemed using the Kartu Tani due to several obstacles faced.

Keywords: Implementation, Subsidized Fertilizer, Farmer Card**PENDAHULUAN**

Pembangunan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern yang tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan pertanian di dominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Realitas yang seringkali ditemui oleh petani adalah kelangkaan pupuk, harga yang naik turun, ketika mendistribusikan pupuk untuk masyarakat mengalami masalah. Di dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan yakni Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfungsi sebagai bentuk

pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2017, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian. Berdasarkan Jumlah Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 terdapat lima jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk masyarakat yaitu urea, sp 36, za, npk, dan organik.

Tujuan dari program Kartu Tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada enam asas yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat waktu, Tepat Harga. Petani yang menggunakan kartu tani ini akan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tahun ini, Kabupaten Probolinggo mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 90.997 ton dengan rincian sebanyak 5 jenis pupuk bersubsidi yaitu, Pupuk Urea sebesar 35.435 ton, Pupuk ZA sebesar 18.023 ton, Pupuk SP-36 sebesar 8.458 ton, Pupuk NPK sebesar 22.065 ton dan Pupuk organik padat sebesar 7.016 ton. Jumlah ini masih ditambah dengan pupuk organik sebanyak 13.414 liter. Alokasi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur Nomor 521/200/110.2/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Probolinggo Nomor 521/18/426.119/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021. Untuk tahun ini, alokasi pupuk bersubsidi secara nasional memang berkurang karena kemampuan pemerintah pusat, karena setiap tahun di awal tahun tidak akan pernah sama seperti serapan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 ini pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Untuk Urea Rp 2.250 per Kg dan Rp 112.500 per karung, ZA

Rp 1.700 per Kg dan 85.000 per karung, SP-36 Rp 2.400 per Kg dan Rp 120.000 per karung, NPK Phonska Rp 2.300 per Kg dan Rp 115.000 per karung serta Petroganik Rp 800 per Kg dan Rp 32.000 per karung.

Penyaluran Kartu Tani di Kabupaten Probolinggo terus dilakukan. Namun, sejauh ini belum bisa mencapai target. Masih banyak kartu yang sudah tercetak namun belum terdistribusikan. Penyaluran kartu tani ini dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan ketersediaan kartu yang siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK). ada sekitar 30.000 keping Kartu Tani bertahap didistribusikan kepada petani di 24 kecamatan. Namun, dari semua kartu yang telah dicetak, tidak seluruhnya didistribusikan. Masih ada beberapa kartu yang tidak ditemukan pemilikinya. Karenanya, masih ditahan dan dilakukan penyesuaian.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adapt desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Menurut Donald S Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2015 : 99) teori implementasi dengan pendekatan rasional top-down dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, antara lain; Standar dan Sasaran Kebijakan; Sumberdaya; Hubungan Antargorganisasi;

Karakteristik Agen Pelaksana; Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi; Disposisi Implementor.

Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan diatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak atau akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Permasalahan yang dihadapi saat ini terutama di Desa Tegalmojo bahwasannya Kepala Desa selaku pihak implementor sudah dilakukan untuk mencapai tujuan program melalui sosialisasi. Meski demikian masih ada kendala yang terjadi dalam proses sosialisasi seperti masalah kemauan para petani untuk berpartisipasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tujuan program penyaluran pupuk bersubsidi sudah dipahami oleh para pelaksana, akan tetapi berbagai kendala teknis seperti kesulitan dalam mutasi data dan mesin EDC yang belum bisa membaca alokasi pupuk masih banyak ditemukan meski sejauh ini masih bisa diatasi dengan cara penebusan manual. Usaha mensosialisasikan juga masih terus dilaksanakan karena para petani belum sepenuhnya memahami alat untuk melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hingga sampai saat ini pun para petani yang masuk dalam kelompok tani belum menerima kartu tani.

Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah perlu menambah intensitas dalam penerapan program ini karena penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani merupakan solusi yang selama ini dibutuhkan untuk menanggulangi penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Intesitas dalam penerapan program sangat dibutuhkan agar kebijakan ini tidak terbengkalai dan menjadi solusi kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai **“Implementasi Program Kartu Tani Terhadap Ketersediaan Pupuk**

Bersubsidi di Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penjelasan mengenai Implementasi Program Kartu Tani Terhadap Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo menggunakan model teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Disposisi Implementor
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya Memahami Penelitian Kualitatif, ketiga teknik tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pupuk Berubsidi dalam pengadaan dan penyalurannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/14/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. Sedangkan Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanain penebusan pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan

Kartu Tani sebagai alat transaksi non tunai. Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang diharapkan lebih transparan serta tepat sasaran. Selain itu Kartu Tani nantinya akan dikembangkan agar bisa berfungsi sebagai simpanan, transaksi, dan penyaluran pinjaman, namun untuk saat ini Kartu Tani hanya bisa digunakan sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi (bumn.go.id). Kartu ini rencananya bersifat wajib karena selain untuk pendataan jumlah petani dan pupuk bersubsidi, juga mengantisipasi penyalahgunaan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak untuk menerimanya.

Dalam pendataannya, program Kartu Tani menggunakan sistem single entry data pada database petani yang disebut dengan eRDKK. E-RDKK adalah singkatan dari Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang berbasis online untuk menginput data, dimana kebutuhan kelompok tani berupa pupuk bersubsidi direncanakan dan didata setiap petaninya untuk selanjutnya diinput. Pengisian data pada e-RDKK dilaksanakan melalui pendataan berbasis Simluhtan (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian) atau bisa juga dengan cara upload dengan format microsoft excel. Data pada e-RDKK tersebut digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pertanian di daerah dan Kementerian Pertanian dalam pengalokasian pupuk bersubsidi setiap tahunnya. E-RDKK digunakan untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi di kios resmi yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir yakni pemegang Kartu Tani.

Tujuan penggunaan Kartu Tani sebagai alat transaksi untuk penebusan pupuk bersubsidi adalah 1) Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani, 2) Terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan Asas 6

(enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga), 3) Upaya mewujudkan kegiatan pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi yang terintegrasi, 4) Meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, 5) Meningkatkan literasi digital pelayanan perbankan bagi petani. Untuk mengkaji implementasi program Kartu Tani terhadap ketersediaan pupuk 2021 di desa Tegalmoyo, kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, peneliti menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel di antaranya:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kartu Tani merupakan kartu debit atau ATM yang apabila telah diaktifkan bisa diisi dengan saldo untuk kemudian digunakan sebagai alat transaksi pupuk bersubsidi di kios resmi. Ukuran keberhasilan program ini adalah transaksi pupuk tidak lagi menggunakan uang tunai melainkan dengan menggunakan Kartu Tani. Selain itu Kartu Tani juga digunakan untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi bagi pemiliknya yakni petani di mesin EDC.

Dari hasil temuan peneliti dapat diketahui bahwa usaha dari para pihak implementor sudah dilakukan untuk mencapai tujuan program melalui sosialisasi. Meski demikian masih ada kendala yang terjadi dalam proses sosialisasi seperti masalah kemauan para petani untuk berpartisipasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tujuan program penyaluran pupuk bersubsidi sudah dipahami oleh para pelaksana, akan tetapi berbagai kendala teknis seperti kesulitan dalam hal mutasi data dan mesin EDC yang belum bisa membaca alokasi pupuk masih banyak ditemukan meski sejauh ini masih bisa diatasi dengan cara penebusan manual. Usaha mensosialisasikan juga masih terus dilaksanakan karena para petani belum sepenuhnya memahami alur untuk melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Variabel ini memiliki kaitan erat dengan salah satu prinsip dalam penyaluran pupuk bersubsidi yakni prinsip 6T (Tepat jumlah, jenis, harga, tempat, waktu, dan mutu). Adapun sumber daya yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya manusia antara lain Kepala Desa Tegalmojo, Ketua Poktan, Pemilik Kios pupuk. Pengurus poktan turut membantu dalam pendataan alokasi pupuk untuk masing-masing petani yang diajukan pada RDKK dan juga para anggota poktan juga turut membantu dalam pendataan untuk RDKK. Pada lingkup pengurus kelompok tani tidak ada masalah terkait jumlah dan kompetensi SDM pelaksana program. Sedangkan kemampuan rata-rata SDM penerima Kartu Tani bisa dibilang masih cukup rendah dengan keterbatasan dalam menggunakan transaksi bank.

Variabel sumber daya waktu berkaitan erat dengan salah satu prinsip 6T yakni Tepat Waktu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan para petani setiap bulan tidak menemui masalah yang berarti. Keterlambatan stok ulang untuk setiap masa tanam ataupun setiap bulannya tidak terlalu lama

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana yang mendukung berjalannya program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo adalah sikap ulet, tulus dan bertanggungjawab.

Keuletan dan ketulusan pelaksana terwujud dalam usaha-usaha yang dilakukan dalam menjalankan program agar bisa diterima dengan terbuka oleh masyarakat dalam hal ini para petani meski jaminan insentif tidak begitu menjanjikan. Meskipun masih belum memenuhi target tujuan, pelaksana program ini telah berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bersikap persuasif dalam memberikan pengaruh positif berupa dukungan kepada petani untuk menghadapi dan mempelajari hadirnya inovasi tentang mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi ini bersama-sama.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam praktik program Kartu Tani yang ada di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bentuk koordinasi yang dilakukan untuk memenuhi target tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dalam persiapan pelaksanaan program dan keberlangsungan program. Dalam persiapan program Kartu Tani pelaksana program telah berkoordinasi dengan Ketua GAPOKTAN serta pemilik kios mengenai pendataan untuk alokasi dan penerapan mekanisme baru penebusan pupuk bersubsidi. Selain itu media komunikasi seperti telepon genggam dan surat/undangan juga digunakan untuk saling terhubung dan berkoordinasi baik antar pelaksana maupun antara pelaksana dan penerima manfaat program. Pemberitahuan dan perkembangan terkait keberlangsungan program dapat diketahui dengan baik oleh semua implementor melalui media komunikasi yang digunakan.

5. Disposisi Implementor

Pelaksana program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani tidak menunjukkan penolakan namun mereka menyatakan bahwa apabila pembuat kebijakan menganggap program Kartu Tani sebagai inovasi yang benar-benar dibutuhkan dan harus diterapkan oleh pelaksana, pembuat kebijakan harus memberikan perhatian khusus demi keberlangsungan program sehingga

kebijakan yang dibuat tidak terbengkalai. Mereka juga menyatakan bahwa harus dimaklumi apabila penerapan Kartu Tani butuh proses yang panjang. Terlebih jika penerapannya dilakukan pada skala nasional. Namun ada baiknya sebelum kebijakan ini diteruskan pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi seberapa penting dan efektifnya penggunaan Kartu Tani. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini harus tetap dijalankan, para pelaksana menyatakan kesanggupannya untuk tetap belajar dan mendampingi para penerima manfaat dengan bersama-sama mengubah pandangan rumit dan sulit menjadi lebih terbuka dan mudah.

Dari segi pemahaman implementor terhadap tugas yang diemban Ketua Gapoktan memahami bahwa tugas utama mereka adalah pendampingan dimana secara rutin menanyakan kepada para petani tentang kesesuaian alokasi pupuk yang didapat. Apabila ada ketidakcocokan data akan kembali ditelusuri untuk diajukan kembali.

6. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga ikut mempengaruhi keberhasilan program. Ketiganya saling berkesinambungan dan mempengaruhi, jika salah satu faktor bermasalah maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Dari ketiga faktor tersebut yang masih perlu diperbaiki adalah faktor sosial yang di dalamnya terdapat partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan inovasi demi perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara faktor politik seperti Kepala Desa dan Ketua Gapoktan sudah memberikan dukungan demi terwujudnya tujuan dari program.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani masih belum memenuhi ukuran keberhasilan. Hal ini dibuktikan dengan temuan di lapangan yaitu

pemegang Kartu Tani serta pemilik kios masih menggunakan mekanisme lama penebusan pupuk bersubsidi karena kendala-kendala seperti beberapa Kartu Tani masih berstatus nonaktif, mesin EDC belum bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi, dan sebagian petani merasa mekanisme baru penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani lebih rumit sehingga tujuan dari program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani ini masih belum tercapai.

Pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani memerlukan sumber daya manusia, finansial, waktu, dan fasilitas yang berkaitan erat dengan prinsip 6 Tepat yakni Jumlah, Jenis, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu. Sedangkan kompetensi SDM para penerima Kartu Tani harus lebih ditingkatkan.

Karakteristik agen pelaksana yang mendukung berjalannya program adalah sikap ulet, tulus, tanggap, dan bertanggung jawab. Keuletan dan ketulusan pelaksana terwujud dalam usaha-usaha sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan agar program bisa diterima dengan terbuka oleh masyarakat tepatnya para petani meskipun jaminan insentif tidak begitu menjanjikan. Sikap tanggap dan tanggung jawab ditunjukkan melalui Ketua Gapoktan yang sudah menjalankan tugas dengan baik.

Komunikasi antar organisasi para pelaksana yang terlibat telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, terbukti dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa serta Ketua Gapoktan. Selain itu media komunikasi seperti telepon genggam, surat, atau undangan juga digunakan untuk saling terhubung dan berkoordinasi antara pengurus. Sehingga perkembangan terkait keberlangsungan program dapat diketahui dengan baik oleh semua implementor.

Dari segi disposisi implementor dalam pelaksanaan program, sebagian pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang cukup baik terhadap pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani, namun beberapa pihak menyatakan bahwa program

ini perlu dievaluasi lagi perlu atau tidaknya untuk diteruskan karena efektifitas dan efisiensinya terbukti belum teruji. Meski demikian para pelaksana tersebut sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penugasan untuk para pelaksana program juga sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga ikut mempengaruhi keberhasilan program. Dari ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah lingkungan ekonomi, dimana masyarakat penerima manfaat program yang mayoritas merupakan petani biasa (tidak memiliki pekerjaan lainnya) tidak terbiasa dengan menyimpan tabungan di Bank. Hal inilah yang menyebabkan animo para petani dalam menyambut mekanisme baru untuk penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani ini rendah. Faktor lain yang masih perlu diperbaiki adalah faktor sosial yang di dalamnya terdapat partisipasi dan keterbukaan masyarakat tentang pentingnya penerapan inovasi demi mengurangi tindakan penyimpangan dan mencapai ketepatan sasaran.

Saran

1. Pemerintah juga harus mempertegas pihak Bank untuk mempercepat proses validasi dan penerbitan Kartu Tani serta memenuhi fasilitas mesin EDC dan Kartu Tani yang memadai agar segera siap untuk digunakan. Pemerintah perlu menambah intensitas dalam penerapan program ini karenapenyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani merupakan solusi yang selama ini dibutuhkan untuk menanggulangi penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu banyak manfaat yang akan didapatkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Intensitas dalam penerapan program sangat dibutuhkan agar kebijakan ini tidak terbengkalai dan menjadi solusi kebijakan yang lebih baik.
2. Pemerintah perlu menambah intensitas dalam penerapan program ini

karenapenyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani merupakan solusi yang selama ini dibutuhkan untuk menanggulangi penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu banyak manfaat yang akan didapatkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Bapak Imam Suchyho, S.IP., M.AP selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Husni Mubaroq, S.Fiil., M.IP selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Slamet Hariyanto selaku Kepala Desa Tegalmojo
4. Bapak Abdullah selaku Ketua GAPOKTAN Desa Tegalmojo

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- [2] Arikonto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- [3] Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice
- [4] Dunn, William N. 2005. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah
- [5] Darwin, Muhadjir. 2013. *Implementasi Kebijakan*. Modul Kursus TMPP MAP.
- [6] Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya
- [7] Saparin, Ny, Dra. 1978. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta : Gahalia Indonesia.

-
- [8] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- [9] Muthiara Latifa Ashari, Dra. Dyah Hariani,MM. 2019. *Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara*. Jurnal Administrasi Negara. Universitas Diponegoro
- [10] Jawanto, Arifin. 2021. *Penyaluran Kartu Tani di Kabupaten Probolinggo Belum Tuntas*. Retrieved from <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaa/n/02/03/2021/penyaluran-kartu-tani-di-kab-probolinggo-belum-tuntas/amp>.
- [11] SK DKPP JATIM No. 521/200/110.2/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Provinsi Jatim Anggaran Th. 2021
- [12] Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN
- [13] SK DKPP Kabupaten Probolinggo No. 521/18/426.119/2021
- [14] PP No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Desa
- [15] PP RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa